



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 515);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 486);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
 13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 38);

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 66);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan, Penambahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal.
7. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.

8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
14. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PAUDNI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. TK Negeri;
 - b. SD Negeri; dan
 - c. SMP Negeri.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu SKB.

BAB III
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan unsur pelaksana teknis operasional dalam pengelolaan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Jabatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi TK Negeri terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Bagan struktur organisasi TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi SD Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Bagan struktur organisasi SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SMP Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;

- b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
 - (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
 - (6) Bagan struktur organisasi SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan anak meliputi program layanan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) SD Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (3) SMP Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), TK Negeri menyelenggarakan fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), SD Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), SMP Negeri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Nama SKB sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB.
- (3) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjalankan tugas memimpin dan mengelola SKB.
- (4) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan program pendidikan non formal.

- (6) Bagan struktur organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan SKB didukung oleh Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), SKB mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan non formal;
- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja dan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan dan unit organisasi, kelompok Jabatan Fungsional, serta jabatan pelaksana wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan mempergunakannya sebagai bahan untuk penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Kepala Satuan Pendidikan mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan koordinasi.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Pendidikan, Pelaksana Urusan Tata Usaha pada Satuan Pendidikan dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat yang ada pada Satuan Pendidikan Negeri tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati in

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

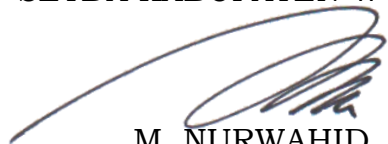
Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

MUHAMAD AZIZ WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, SH
Pembina
197211101998031013

Lampiran I : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 29 Tahun 2019

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

No.	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
1.	Taman Kanak – Kanak Negeri	1. TK NEGERI PEMBINA SAPURAN
		2. TK NEGERI PEMBINA SELOMERTO
		3. TK NEGERI PEMBINA WONOSOBO
2.	Sekolah Dasar Negeri	1. SD NEGERI 1 GARUNG
		2. SD NEGERI SITI HARJO
		3. SD NEGERI MENJER
		4. SD NEGERI 3 GARUNG
		5. SD NEGERI SIWURAN
		6. SD NEGERI KURIPAN
		7. SD NEGERI TLOGO
		8. SD NEGERI 2 GARUNG
		9. SD NEGERI 1 MLANDI
		10. SD NEGERI 2 JENGKOL
		11. SD NEGERI 2 SENDANGSARI
		12. SD NEGERI 1 KAYUGIYANG
		13. SD NEGERI 2 KAYUGIYANG
		14. SD NEGERI 1 JENGKOL
		15. SD NEGERI 2 LENGKONG
		16. SD NEGERI 1 GEMBLENGAN
		17. SD NEGERI MARON
		18. SD NEGERI 1 SENDANGSARI
		19. SD NEGERI 1 LENGKONG
		20. SD NEGERI TEGALSARI
		21. SD NEGERI 2 MARON
		22. SD NEGERI 2 GEMBLENGAN
		23. SD NEGERI LARANGAN
		24. SD NEGERI 2 MLANDI
		25. SD NEGERI MERGOLANGU
		26. SD NEGERI 2 DEMPEL
		27. SD NEGERI 1 TEMPUREJO
		28. SD NEGERI 1 KALIKARUNG
		29. SD NEGERI 2 TEMPUREJO
		30. SD NEGERI 2 PENGARENGAN
		31. SD NEGERI 1 PENGARENGAN
		32. SD NEGERI 1 KALIBAWANG
		33. SD NEGERI 3 TEMPUREJO
		34. SD NEGERI 1 DEPOK
		35. SD NEGERI 3 DEMPEL
		36. SD NEGERI 2 KALIKARUNG
		37. SD NEGERI 1 DEMPEL
		38. SD NEGERI KALIALANG
		39. SD NEGERI 2 KALIBAWANG
		40. SD NEGERI 3 KALIKARUNG
		41. SD NEGERI 4 KALIKARUNG
		42. SD NEGERI 1 BOWONGSO
		43. SD NEGERI 1 MADURETNO

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		44. SD NEGERI 3 KEMBARAN
		45. SD NEGERI 1 PERBOTO
		46. SD NEGERI 1 KALIKAJAR
		47. SD NEGERI 1 KEMBARAN
		48. SD NEGERI 1 MANGUNREJO
		49. SD NEGERI 2 BOWONGSO
		50. SD NEGERI 1 SIMBANG
		51. SD NEGERI 2 PURWOJIWO
		52. SD NEGERI 1 BUTUH
		53. SD NEGERI 2 TEGALOMBO
		54. SD NEGERI 2 KEMBARAN
		55. SD NEGERI 4 BUTUH
		56. SD NEGERI 2 LAMUK
		57. SD NEGERI 1 PURWOJIWO
		58. SD NEGERI 2 MADURETNO
		59. SD NEGERI 1 TEGALOMBO
		60. SD NEGERI 2 KEDALON
		61. SD NEGERI 1 LAMUK
		62. SD NEGERI 1 KALIKUNING
		63. SD NEGERI 2 SIMBANG
		64. SD NEGERI 1 REJOSARI
		65. SD NEGERI 1 KWADUNGAN
		66. SD NEGERI 3 BUTUH
		67. SD NEGERI 3 KWADUNGAN
		68. SD NEGERI 1 KEDALON
		69. SD NEGERI 2 KWADUNGAN
		70. SD NEGERI 2 KARANGDUWUR
		71. SD NEGERI 1 KARANGDUWUR
		72. SD NEGERI 1 WONOSARI
		73. SD NEGERI 2 REJOSARI
		74. SD NEGERI 2 WONOSARI
		75. SD NEGERI 2 BUTUH
		76. SD NEGERI 3 LAMUK
		77. SD NEGERI 3 KALIKAJAR
		78. SD NEGERI 5 BUTUH
		79. SD NEGERI 2 MANGUNREJO
		80. SD NEGERI 4 KWADUNGAN
		81. SD NEGERI MUNGKUNG
		82. SD NEGERI 2 PERBOTO
		83. SD NEGERI 1 KALIWIRO
		84. SD NEGERI 2 NGADISONO
		85. SD NEGERI 1 TANJUNGANOM
		86. SD NEGERI 1 WINONGSARI
		87. SD NEGERI GRUGU
		88. SD NEGERI SUKORENO
		89. SD NEGERI 1 NGADISONO
		90. SD NEGERI 2 KALIWIRO
		91. SD NEGERI 1 LAMUK
		92. SD NEGERI PURWOSARI
		93. SD NEGERI 2 KEMIRIOMBO
		94. SD NEGERI GAMBARAN
		95. SD NEGERI 2 WINONGSARI
		96. SD NEGERI 2 LAMUK
		97. SD NEGERI 1 TRACAP

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		98. SD NEGERI KAUMAN
		99. SD NEGERI 2 PUCUNGKEREP
		100. SD NEGERI CLEDOK
		101. SD NEGERI 1 PUCUNGKEREP
		102. SD NEGERI 1 PESODONGAN
		103. SD NEGERI SELOMANIK
		104. SD NEGERI 3 LAMUK
		105. SD NEGERI 2 TANJUNGANOM
		106. SD NEGERI 2 PESODONGAN
		107. SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO
		108. SD NEGERI LEBAK
		109. SD NEGERI 1 KALIGUWO
		110. SD NEGERI 3 KEMIRIOMBO
		111. SD NEGERI 2 TRACAP
		112. SD NEGERI 1 MEDONO
		113. SD NEGERI NGASINAN
		114. SD NEGERI BENDUNGAN
		115. SD NEGERI 1 SIGEDANG
		116. SD NEGERI KEJAJAR
		117. SD NEGERI DIENG
		118. SD NEGERI KREO
		119. SD NEGERI 1 PARIKESIT
		120. SD NEGERI 2 SURENGEDE
		121. SD NEGERI 1 TAMBI
		122. SD NEGERI 1 SERANG
		123. SD NEGERI 2 TAMBI
		124. SD NEGERI 1 SURENGEDE
		125. SD NEGERI PATAK BANTENG
		126. SD NEGERI 1 BUNTU
		127. SD NEGERI 1 SIKUNANG
		128. SD NEGERI CAMPURSARI
		129. SD NEGERI 2 PARIKESIT
		130. SD NEGERI 2 SIGEDANG
		131. SD NEGERI 2 SIKUNANG
		132. SD NEGERI 3 SURENGEDE
		133. SD NEGERI IGIRMRANAK
		134. SD NEGERI JOJOGAN
		135. SD NEGERI SEMBUNGAN
		136. SD NEGERI 2 SERANG
		137. SD NEGERI 2 BUNTU
		138. SD NEGERI 1 PULOSAREN
		139. SD NEGERI 1 KEPIL
		140. SD NEGERI 2 KEPIL
		141. SD NEGERI BENER
		142. SD NEGERI 1 GONDOWULAN
		143. SD NEGERI 3 GONDOWULAN
		144. SD NEGERI 2 PULOSAREN
		145. SD NEGERI 1 KALIWULUH
		146. SD NEGERI BURAT
		147. SD NEGERI 1 TEGESWETAN
		148. SD NEGERI 2 BERAN
		149. SD NEGERI 1 BERAN
		150. SD NEGERI 3 ROPOH
		151. SD NEGERI 1 JANGKRIKAN

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		152. SD NEGERI 2 KALIWULUH
		153. SD NEGERI 1 ROPOH
		154. SD NEGERI 2 TEGESWETAN
		155. SD NEGERI 3 GADINGREJO
		156. SD NEGERI 2 KAGUNGAN
		157. SD NEGERI 2 GONDOWULAN
		158. SD NEGERI 2 ROPOH
		159. SD NEGERI 1 GADINGSUKUH
		160. SD NEGERI RANDUSARI
		161. SD NEGERI 1 WARANGAN
		162. SD NEGERI 3 KEPIL
		163. SD NEGERI KAPULOGO
		164. SD NEGERI 4 GADINGREJO
		165. SD NEGERI REJOSARI
		166. SD NEGERI KALIPURU
		167. SD NEGERI 1 GADINGREJO
		168. SD NEGERI 3 JANGKRIKAN
		169. SD NEGERI 1 TANJUNGANOM
		170. SD NEGERI 3 KALIWULUH
		171. SD NEGERI 2 GADINGSUKUH
		172. SD NEGERI 2 WARANGAN
		173. SD NEGERI 2 TEGALGOT
		174. SD NEGERI 2 JANGKRIKAN
		175. SD NEGERI 1 TEGALGOT
		176. SD NEGERI 1 KAGUNGAN
		177. SD NEGERI 2 TANJUNGANOM
		178. SD NEGERI 3 TANJUNGANOM
		179. SD NEGERI CANDIYASAN
		180. SD NEGERI 1 PAGEREJO
		181. SD NEGERI 2 CANDIMULYO
		182. SD NEGERI 1 RECO
		183. SD NEGERI 2 RECO
		184. SD NEGERI 1 KAPENCAR
		185. SD NEGERI PURBOSONO
		186. SD NEGERI TLOGOMULYO
		187. SD NEGERI DAMARKASIYAN
		188. SD NEGERI 1 CANDIMULYO
		189. SD NEGERI TLOGODALEM
		190. SD NEGERI 2 KARANGLUHUR
		191. SD NEGERI 2 PURWOJATI
		192. SD NEGERI 1 KARANGLUHUR
		193. SD NEGERI 2 KAPENCAR
		194. SD NEGERI 2 PAGEREJO
		195. SD NEGERI 1 NGADIKUSUMAN
		196. SD NEGERI 1 KERTEK
		197. SD NEGERI 3 KERTEK
		198. SD NEGERI 2 BEJIARUM
		199. SD NEGERI 2 BOJASARI
		200. SD NEGERI 1 BOJASARI
		201. SD NEGERI 2 NGADIKUSUMAN
		202. SD NEGERI 2 SINDUPATEN
		203. SD NEGERI BANJAR
		204. SD NEGERI SURENGEDE
		205. SD NEGERI WRINGINANOM

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		206. SD NEGERI 1 SUMBERDALEM
		207. SD NEGERI 1 SUDUNGDEWO
		208. SD NEGERI 1 PURWOJATI
		209. SD NEGERI 1 BEJIARUM
		210. SD NEGERI 1 SINDUPATEN
		211. SD NEGERI TIMBANG
		212. SD NEGERI 1 LEKSONO
		213. SD NEGERI 2 SOJOKERTO
		214. SD NEGERI 1 SELOKROMO
		215. SD NEGERI 1 PACARMULYO
		216. SD NEGERI WONOKERTO
		217. SD NEGERI DURENSAWIT
		218. SD NEGERI 1 JLAMPRANG
		219. SD NEGERI 3 LEKSONO
		220. SD NEGERI 1 KALIMENDONG
		221. SD NEGERI 2 JLAMPRANG
		222. SD NEGERI 1 JONGGOLSARI
		223. SD NEGERI LIPURSARI
		224. SD NEGERI 2 KALIMENDONG
		225. SD NEGERI 1 SAWANGAN
		226. SD NEGERI 1 MANGGIS
		227. SD NEGERI 3 JONGGOLSARI
		228. SD NEGERI 2 BESANI
		229. SD NEGERI 2 SAWANGAN
		230. SD NEGERI 1 BESANI
		231. SD NEGERI 1 SOJOKERTO
		232. SD NEGERI KESENENG
		233. SD NEGERI 1 MUDAL
		234. SD NEGERI 2 SLUKATAN
		235. SD NEGERI GUNTURMADU
		236. SD NEGERI 1 KALIBEBER
		237. SD NEGERI DERONGISOR
		238. SD NEGERI 2 MUDAL
		239. SD NEGERI 1 BUMIREJO
		240. SD NEGERI 2 DERODUWUR
		241. SD NEGERI 1 DERODUWUR
		242. SD NEGERI 1 KRASAK
		243. SD NEGERI 2 KALIBEBER
		244. SD NEGERI SOJOPURO
		245. SD NEGERI CANDIREJO
		246. SD NEGERI ANDONGSILI
		247. SD NEGERI 1 PUNGANGAN
		248. SD NEGERI 2 MOJOSARI
		249. SD NEGERI 2 KRASAK
		250. SD NEGERI 2 PUNGANGAN
		251. SD NEGERI 2 BUMIREJO
		252. SD NEGERI BLEDERAN
		253. SD NEGERI SUKOREJO
		254. SD NEGERI 1 MOJOSARI
		255. SD NEGERI 2 WONOKROMO
		256. SD NEGERI LARANGAN KULON
		257. SD NEGERI KEBRENGAN
		258. SD NEGERI 1 WONOKROMO
		259. SD NEGERI 1 SLUKATAN

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		260. SD NEGERI 1 SAPURAN
		261. SD NEGERI 1 SEDAYU
		262. SD NEGERI 1 PECEKELAN
		263. SD NEGERI 3 BANYUMUDAL
		264. SD NEGERI 1 BATURSARI
		265. SD NEGERI 1 TEMPURANDUWUR
		266. SD NEGERI 2 RIMPAK
		267. SD NEGERI SUROJOYO
		268. SD NEGERI 4 SAPURAN
		269. SD NEGERI 1 BANYUMUDAL
		270. SD NEGERI 2 BANYUMUDAL
		271. SD NEGERI NGADISALAM
		272. SD NEGERI 2 PECEKELAN
		273. SD NEGERI 1 NGADIKERSO
		274. SD NEGERI 1 RIMPAK
		275. SD NEGERI 2 BATURSARI
		276. SD NEGERI 3 SAPURAN
		277. SD NEGERI 1 TEMPURSARI
		278. SD NEGERI 1 GLAGAH
		279. SD NEGERI KARANGSARI
		280. SD NEGERI 2 TEMPURSARI
		281. SD NEGERI TEMPURANDUWUR 2
		282. SD NEGERI 1 BOGORAN
		283. SD NEGERI MARONGSARI
		284. SD NEGERI 2 SEDAYU
		285. SD NEGERI JOLONTORO
		286. SD NEGERI 3 BATURSARI
		287. SD NEGERI 2 BOGORAN
		288. SD NEGERI TALUNOMBO
		289. SD NEGERI 2 NGADIKERSO
		290. SD NEGERI 2 GLAGAH
		291. SD NEGERI SELOMERTO
		292. SD NEGERI 1 KALIERANG
		293. SD NEGERI 1 ADIWARNO
		294. SD NEGERI TUMENGGUNGAN
		295. SD NEGERI KADIPATEN
		296. SD NEGERI SINDUAGUNG
		297. SD NEGERI 2 KALIERANG
		298. SD NEGERI WONOREJO
		299. SD NEGERI BALEKAMBANG
		300. SD NEGERI WILAYU
		301. SD NEGERI PAKUNCEN
		302. SD NEGERI NGADIMULYO
		303. SD NEGERI SEMAYU
		304. SD NEGERI 2 KRASAK
		305. SD NEGERI SIMBAREJO
		306. SD NEGERI SIDOREJO
		307. SD NEGERI SUMBERWULAN
		308. SD NEGERI PLOBANGAN
		309. SD NEGERI 1 KARANGREJO
		310. SD NEGERI CANDI
		311. SD NEGERI KALIPUTIH
		312. SD NEGERI 3 KARANGREJO
		313. SD NEGERI 1 BUMITIRTO

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		314. SD NEGERI WULUNGSARI
		315. SD NEGERI KECIS
		316. SD NEGERI 1 KRASAK
		317. SD NEGERI GUNUNG TAWANG
		318. SD NEGERI KAJEKSAN
		319. SD NEGERI GUNUNG TUGEL
		320. SD NEGERI 1 TLOGO
		321. SD NEGERI 2 TLOGO
		322. SD NEGERI PLODONGAN
		323. SD NEGERI KARANGANYAR
		324. SD NEGERI 1 PUCUNGWETAN
		325. SD NEGERI 1 SUKOHARJO
		326. SD NEGERI JEBENG PLAMPITAN
		327. SD NEGERI 3 TLOGO
		328. SD NEGERI 1 KALIBENING
		329. SD NEGERI 2 PUCUNGWETAN
		330. SD NEGERI PULUS
		331. SD NEGERI MERGOSARI
		332. SD NEGERI 2 KALIBENING
		333. SD NEGERI 2 GARUNGLOR
		334. SD NEGERI KUPANGAN
		335. SD NEGERI GUMIWANG
		336. SD NEGERI 2 SUROYUDAN
		337. SD NEGERI 3 SUKOHARJO
		338. SD NEGERI 1 SUROYUDAN
		339. SD NEGERI 2 SUKOHARJO
		340. SD NEGERI 1 GARUNGLOR
		341. SD NEGERI SEMPOL
		342. SD NEGERI 1 ROGOJATI
		343. SD NEGERI 2 ROGOJATI
		344. SD NEGERI PANERUSAN
		345. SD NEGERI 2 KALIGOWONG
		346. SD NEGERI 2 WADASLINTANG
		347. SD NEGERI 1 WADASLINTANG
		348. SD NEGERI 2 PLUNJARAN
		349. SD NEGERI 1 SOMOGEDE
		350. SD NEGERI 2 GUMELAR
		351. SD NEGERI 2 SOMOGEDE
		352. SD NEGERI 1 BESUKI
		353. SD NEGERI 1 LANCAR
		354. SD NEGERI 2 LANCAR
		355. SD NEGERI 1 NGALIAN
		356. SD NEGERI 1 KALIGOWONG
		357. SD NEGERI 4 NGALIAN
		358. SD NEGERI 2 NGALIAN
		359. SD NEGERI 2 TRIMULYO
		360. SD NEGERI 3 TRIMULYO
		361. SD NEGERI 1 GUMELAR
		362. SD NEGERI 1 TIRIP
		363. SD NEGERI 3 WADASLINTANG
		364. SD NEGERI 2 KARANGANYAR
		365. SD NEGERI 1 TRIMULYO
		366. SD NEGERI 2 KUMEJING
		367. SD NEGERI 2 SUMBEREJO

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		368. SD NEGERI 3 BESUKI
		369. SD NEGERI 3 TIRIP
		370. SD NEGERI 2 EROREJO
		371. SD NEGERI 3 KALIGOWONG
		372. SD NEGERI 1 KUMEJING
		373. SD NEGERI 2 TIRIP
		374. SD NEGERI 3 NGALIAN
		375. SD NEGERI 1 EROREJO
		376. SD NEGERI 1 PLUNJARAN
		377. SD NEGERI 2 KALIDADAP
		378. SD NEGERI 1 KALIDADAP
		379. SD NEGERI 2 BESUKI
		380. SD NEGERI 3 GUMELAR
		381. SD NEGERI 1 SUMBEREJO
		382. SD NEGERI 1 KARANGANYAR
		383. SD NEGERI SUMBERSARI
		384. SD NEGERI 1 GONDANG
		385. SD NEGERI KURIPAN
		386. SD NEGERI 1 BINANGUN
		387. SD NEGERI BUMIROSO
		388. SD NEGERI PASURUHAN
		389. SD NEGERI 3 WONOROTO
		390. SD NEGERI 2 LUMAJANG
		391. SD NEGERI 2 WONOKAMPIR
		392. SD NEGERI 1 BANYUKEMBAR
		393. SD NEGERI 1 LUMAJANG
		394. SD NEGERI 2 WONOROTO
		395. SD NEGERI 4 BINANGUN
		396. SD NEGERI 1 KRINJING
		397. SD NEGERI 2 WATUMALANG
		398. SD NEGERI 3 BINANGUN
		399. SD NEGERI 2 KRINJING
		400. SD NEGERI 1 KALIDASEL
		401. SD NEGERI 2 BANYUKEMBAR
		402. SD NEGERI 1 WONOROTO
		403. SD NEGERI 1 GUMAWANG KIDUL
		404. SD NEGERI 1 WONOKAMPIR
		405. SD NEGERI 1 LIMBANGAN
		406. SD NEGERI 2 BINANGUN
		407. SD NEGERI 3 LUMAJANG
		408. SD NEGERI 3 WONOKAMPIR
		409. SD NEGERI 1 WATUMALANG
		410. SD NEGERI 2 LIMBANGAN
		411. SD NEGERI 2 KALIDASEL
		412. SD NEGERI 1 MUTISARI
		413. SD NEGERI 1 WONOSROYO
		414. SD NEGERI PAGERKUKUH
		415. SD NEGERI 1 WONOSOBO
		416. SD NEGERI SAMBEK
		417. SD NEGERI WONOLELO
		418. SD NEGERI 8 WONOSOBO
		419. SD NEGERI 1 BOMERTO
		420. SD NEGERI 10 WONOSOBO
		421. SD NEGERI 1 KEJIWAN

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		422. SD NEGERI TAWANGSARI
		423. SD NEGERI 2 MLIPAK
		424. SD NEGERI 2 TLOGOJATI
		425. SD NEGERI 1 MLIPAK
		426. SD NEGERI 1 ROJOIMO
		427. SD NEGERI 2 WONOSOBO
		428. SD NEGERI JOGOYITNAN
		429. SD NEGERI 2 JLAMPRANG
		430. SD NEGERI 3 JARAKSARI
		431. SD NEGERI 1 JARAKSARI
		432. SD NEGERI 5 WONOSOBO
		433. SD NEGERI 2 JARAKSARI
		434. SD NEGERI 4 JARAKSARI
		435. SD NEGERI WONOSARI
		436. SD NEGERI 1 JLAMPRANG
		437. SD NEGERI 1 KRAMATAN
		438. SD NEGERI 1 TLOGOJATI
		439. SD NEGERI SARIYOSO
		440. SD NEGERI BUMIRESO
		441. SD NEGERI 2 ROJOIMO
		442. SD NEGERI KALIANGET
		443. SD NEGERI 2 BOMERTO
		444. SD NEGERI PANCURWENING
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri	1. SMP NEGERI 1 GARUNG
		2. SMP NEGERI 2 GARUNG
		3. SMP NEGERI 3 GARUNG
		4. SMP NEGERI 1 KALIBAWANG
		5. SMP NEGERI 2 KALIBAWANG
		6. SMP NEGERI 3 KALIBAWANG
		7. SMP NEGERI 4 SATU ATAP KALIBAWANG
		8. SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBAWANG
		9. SMP NEGERI 1 KALIKAJAR
		10. SMP NEGERI 2 KALIKAJAR
		11. SMP NEGERI 3 KALIKAJAR
		12. SMP NEGERI 4 KALIKAJAR
		13. SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIKAJAR
		14. SMP NEGERI 1 KALIWIRO
		15. SMP NEGERI 2 KALIWIRO
		16. SMP NEGERI 3 KALIWIRO
		17. SMP NEGERI 4 KALIWIRO
		18. SMP NEGERI 5 KALIWIRO
		19. SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIWIRO
		20. SMP NEGERI 7 SATU ATAP KALIWIRO
		21. SMP NEGERI 1 KEJAJAR
		22. SMP NEGERI 2 KEJAJAR
		23. SMP NEGERI 3 SATU ATAP KEJAJAR
		24. SMP NEGERI 1 KEPIL

No	Satuan Pendidikan Formal	Nama Satuan Pendidikan
		25. SMP NEGERI 2 KEPIL
		26. SMP NEGERI 3 KEPIL
		27. SMP NEGERI 4 KEPIL
		28. SMP NEGERI 5 KEPIL
		29. SMP NEGERI 6 SATU ATAP KEPIL
		30. SMP NEGERI 7 SATU ATAP KEPIL
		31. SMP NEGERI 1 KERTEK
		32. SMP NEGERI 2 KERTEK
		33. SMP NEGERI 3 KERTEK
		34. SMP NEGERI 4 KERTEK
		35. SMP NEGERI 1 LEKSONO
		36. SMP NEGERI 2 LEKSONO
		37. SMP NEGERI 3 LEKSONO
		38. SMP NEGERI 1 MOJOTENGAH
		39. SMP NEGERI 2 MOJOTENGAH
		40. SMP NEGERI 3 MOJOTENGAH
		41. SMP NEGERI 1 SAPURAN
		42. SMP NEGERI 2 SAPURAN
		43. SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAPURAN
		44. SMP NEGERI 4 SAPURAN
		45. SMP NEGERI 5 SATU ATAP SAPURAN
		46. SMP NEGERI 1 SELOMERTO
		47. SMP NEGERI 2 SELOMERTO
		48. SMP NEGERI 3 SELOMERTO
		49. SMP NEGERI 1 SUKOHARJO
		50. SMP NEGERI 2 SUKOHARJO
		51. SMP NEGERI 3 SUKOHARJO
		52. SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUKOHARJO
		53. SMP NEGERI 5 SATU ATAP SUKOHARJO
		54. SMP NEGERI 1 WADASLINTANG
		55. SMP NEGERI 10 SATU ATAP WADASLINTANG
		56. SMP NEGERI 2 WADASLINTANG
		57. SMP NEGERI 3 WADASLINTANG
		58. SMP NEGERI 4 WADASLINTANG
		59. SMP NEGERI 5 WADASLINTANG
		60. SMP NEGERI 6 WADASLINTANG
		61. SMP NEGERI 7 SATU ATAP WADASLINTANG
		62. SMP NEGERI 9 SATU ATAP WADASLINTANG
		63. SMP NEGERI 1 WATUMALANG
		64. SMP NEGERI 2 WATUMALANG
		65. SMP NEGERI 3 WATUMALANG
		66. SMP NEGERI 4 SATU ATAP WATUMALANG
		67. SMP NEGERI 5 WATUMALANG
		68. SMP NEGERI 6 SATU ATAP WATUMALANG
		69. SMP NEGERI 1 WONOSOBO

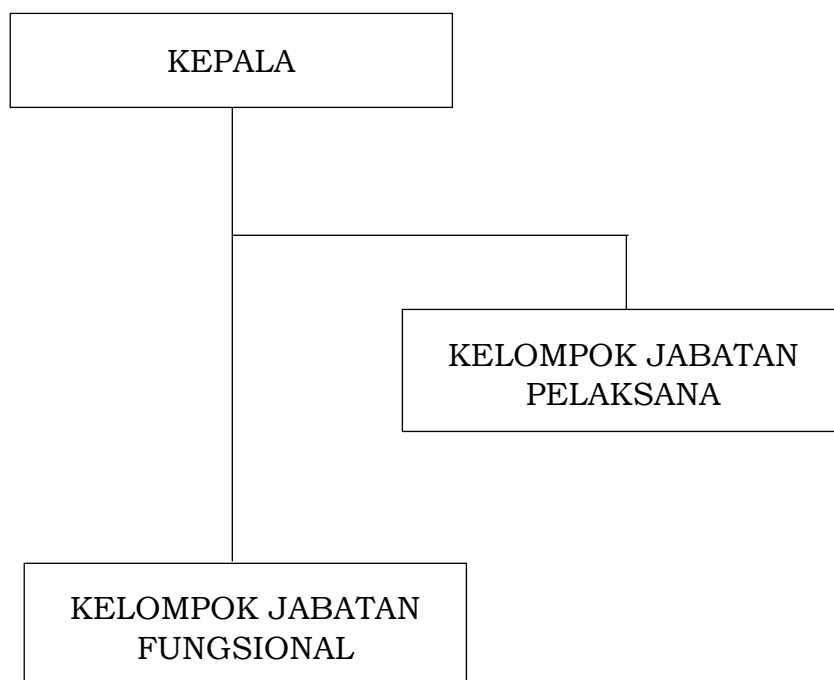
	70. SMP NEGERI 2 WONOSOBO
	71. SMP NEGERI 3 WONOSOBO
	72. SMP NEGERI 4 WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI

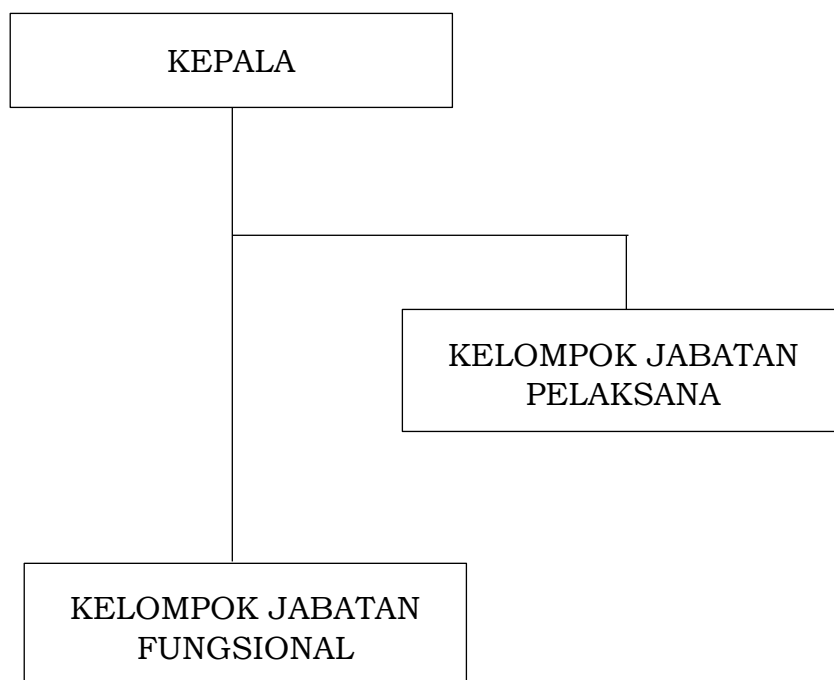


BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI



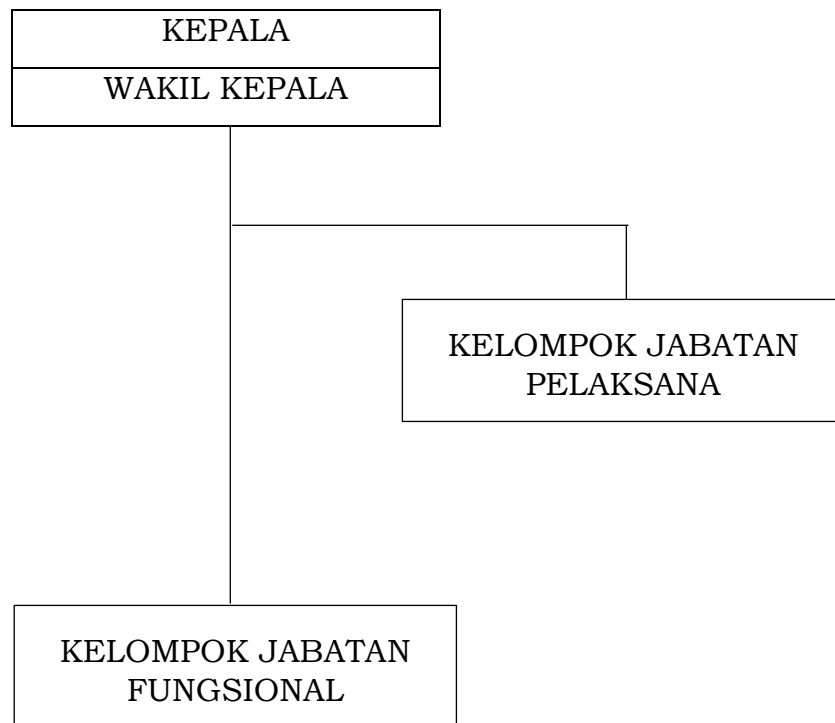
BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 29 Tahun 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

Lampiran V : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 29 Tahun 2019

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

No.	Satuan Pendidikan Non Formal	Nama Satuan Pendidikan
1.	Sanggar Kegiatan Belajar	1. SKB Wonosobo

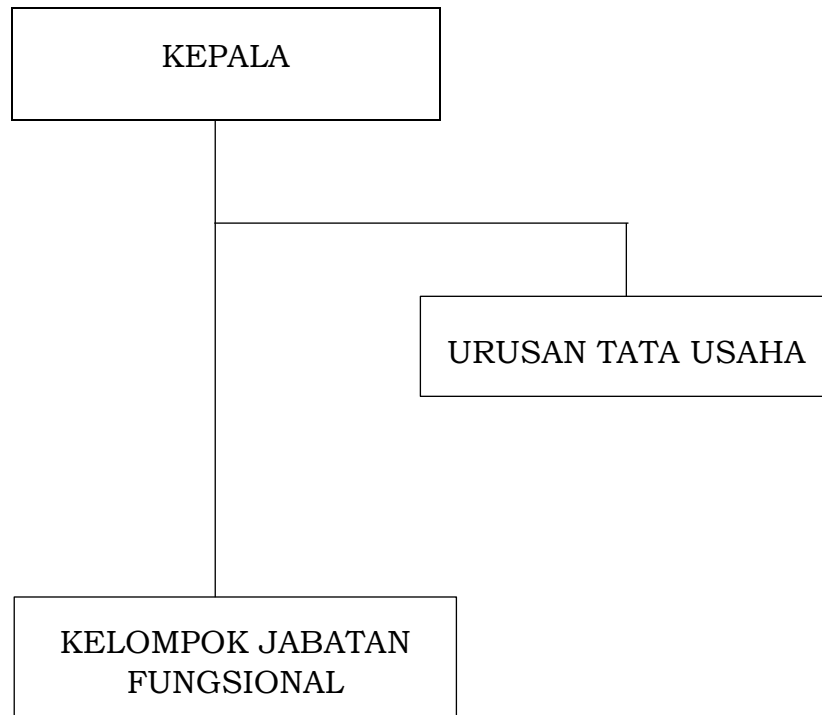
BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO

Lampiran VI : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 29 Tahun 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

Ttd.

EKO PURNOMO